

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian yang menggunakan pendekatan analisis data panel dinamis untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan upah minimum kabupaten/kota terhadap ketimpangan pendapatan di 5 kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2014 hingga 2023 dapat disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi menunjukkan pola hubungan yang nonlinear. Dalam jangka pendek, variabel pertumbuhan ekonomi menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan secara statistik terhadap ketimpangan pendapatan. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi *quadratic* menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan yang menggambarkan bahwa dalam jangka panjang, peningkatan pertumbuhan ekonomi berkontribusi dalam mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan. Temuan ini mendukung teori Kuznets bahwa pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang yang berkelanjutan dan inklusif akan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan.

Variabel kemiskinan menunjukkan hasil yang positif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dikarenakan beberapa wilayah di DIY memiliki tingkat kemiskinan tinggi namun ketimpangan pendapatan rendah sementara itu ketimpangan justru lebih banyak terjadi di wilayah dengan kemiskinan rendah sehingga menunjukkan bahwa tingginya kemiskinan tidak selalu signifikan mempengaruhi ketimpangan pendapatan.

Variabel upah minimum kabupaten/kota menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta karena struktur ketenagakerjaan di DIY didominasi oleh pekerja sektor informal dan upah minimum hanya mempengaruhi penduduk yang bekerja di sektor formal sehingga memperluas tingkat ketimpangan. Selain itu, perbedaan UMK yang cukup besar antar wilayah di DIY juga berkontribusi terhadap tingginya ketimpangan pendapatan.

5.2 Implikasi Kebijakan

Berdasarkan hasil dan kesimpulan yang telah dijelaskan maka beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat peneliti ajukan sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan untuk lebih memfokuskan dan menitikberatkan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan tidak hanya berfokus pada percepatan laju pertumbuhan ekonomi semata melainkan juga menjamin bahwa hasil pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dirasakan secara adil dan proporsional oleh seluruh lapisan masyarakat.
2. Kebijakan dan program dalam pengentasan kemiskinan di DIY perlu disesuaikan dengan upaya pengurangan ketimpangan pendapatan karena hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tingkat kemiskinan mengalami penurunan dampaknya terhadap ketimpangan pendapatan tidak signifikan. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuat kebijakan pengentasan kemiskinan yang tidak hanya berfokus pada pengurangan jumlah penduduk miskin di daerah tertinggal namun juga harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di wilayah perkotaan yang menjadi pusat ketimpangan pendapatan sehingga pengurangan kemiskinan dan ketimpangan dapat dicapai secara bersamaan.
3. Kebijakan upah minimum perlu ditinjau kembali supaya tidak semakin memperlebar ketimpangan antara pekerja formal dan informal terutama di DIY yang didominasi sektor informal. Pemerintah juga perlu mengembangkan kebijakan yang juga menjangkau sektor informal seperti memberikan dukungan terhadap UMKM melalui insentif atau pelatihan. Selain itu, adanya perbedaan upah minimum yang cukup signifikan antar kabupaten/kota di Provinsi DIY menunjukkan bahwa kabupaten dengan upah minimum terendah seharusnya bisa melakukan penyesuaian agar tingkat upahnya selaras dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi DIY.